

Pergeseran Ketenagakerjaan di Pedesaan

Darmawan Salman

Pendahuluan

Salasan akhir pembangunan ekonomi sepanjang lima Pelita Jangka Panjang Pertama adalah terciptanya struktur perekonomian berimbang. Struktur ekonomi berimbang ini ditandai oleh berkembangnya sektor industri yang maju dan ditopang sektor pertanian yang tangguh. Berdasarkan struktur tersebut, pembangunan lalu diarahkan untuk "tinggal landas" menuju struktur ekonomi dengan penekanan pada sektor industri.

Kriteria perimbangan sektor perekonomian tidak hanya diukur dari kontribusi kedua sektor terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), tetapi juga pada kemampuannya menyerap tenaga kerja. Artinya, secara struktural selain terjadi perubahan kontribusi terhadap GDP, juga timbul pergeseran dalam porsi penyerapan tenaga kerja.

Tenaga kerja telah beralih dari pertanian ke nonpertanian selama berlangsung pembangunan di pedesaan. Yang menjadi

masalah ialah bahwa pada saat sektor pertanian mengalami kemunduran dalam menyerap tenaga kerja, tenaga kerja justru makin bertambah; sementara sektor nonpertanian belum sepenuhnya mampu menyerap luapan tenaga kerja tersebut. Pada sisi lain, tidak semua bekas tenaga kerja pertanian dapat bekerja di sektor nonpertanian, terutama industri. Selain meningkatnya arus migrasi desa-kota, kompleksitas masalah ini juga menjadi penyebab munculnya sektor informal dan pengangguran di pedesaan.

Bagian awal tulisan ini menguraikan proses terjadinya pergeseran kontribusi sektoral dalam pembangunan menuju struktur ekonomi berimbang, dengan latar belakang struktur ekonomi periode 1971-1987. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian pergeseran ketenagakerjaan dan masalahnya, terutama dalam lingkup pedesaan. Pada bagian ini dibahas beberapa alasan bergesernya tenaga kerja pertanian, sektor-sektor apa saja yang menjadi tujuan dalam pergeseran tersebut. Pembahasan selanjutnya merupakan analisis tentang pengangguran dan sektor informal di

pedesaan serta meningkatnya arus migrasi desa-kota. Sebelum catatan kesimpulan dan implikasi, ditawarkan suatu strategi simbiosis pembangunan dalam kerangka ketenagakerjaan. Pada bagian ini dibahas strategi interaksi desa-kota dan strategi simbiosis pertanian industri.

Pembangunan dan Struktur Ekonomi Berimbang

Kontribusi Sektoral Terhadap GDP

Sejak dicanangkannya Repelita, keadaan ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat setelah keadaan sebelumnya hampir mengalami stagnasi. Pada periode 1961-1971 pertumbuhan ekonomi hanya 1,75% per tahun, sedang pertumbuhan penduduk 2,5%. Keadaan ekonomi membaik sejak 1969-1973 (Pelita I), ketika pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 9,97% per tahun. Laju pertumbuhan tersebut perlahan-lahan menurun pada periode selanjutnya: 6,61% per tahun pada 1973-1978 (Pelita II) dan 4,03% pada 1983-1987 (Pelita IV).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perubahan struktural antar sektor juga berlangsung, khususnya pada sektor-sektor utama yakni pertanian dan industri. Kontribusi sektor pertanian menurun tajam dari 34,07% (1978) menjadi 24,14% (1981). Antara 1981-1987 karena pertumbuhan GDP yang lambat, kontribusi pertanian hanya turun sedikit menjadi 23,44% pada tahun 1987. Sementara itu kontribusi sektor nonpertanian justru menunjukkan peningkatan. Kontribusi sektor industri yang pada tahun 1971 hanya 8,4% naik menjadi 11,6% (1980). Begitu pula dengan sektor lain, kecuali pertambangan, mengalami peningkatan.

Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa arah perimbangan antar sektor dalam perekonomian, terutama antara pertanian dan industri, memang mulai nampak. Kontribusi sektor industri secara proporsional makin meningkat, sementara itu persentase kontribusi sektor pertanian semakin menurun.

Kontribusi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sejalan dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap produksi nasional, kemampuannya menyerap tenaga kerja juga menurun. Sebelum Repelita, penurunan itu belum begitu tajam bahkan amat lambat. Pada tahun 1961 tercatat tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian masih 71,9% kemudian turun sedikit menjadi 66,3% pada tahun 1971.

Tenaga kerja pertanian yang berdasarkan sensus penduduk 1971 masih 66,3%, menurun menjadi 61,6% berdasarkan Sakermas 1976. Angka tersebut turun lagi menjadi 55,9% dalam sensus penduduk 1980, dan menurun menjadi 54,9% berdasarkan Supas 1985. Penyerapan tenaga kerja sektor industri pada tahun 1971 sangat kecil, yakni 6,8%. Pada tahun 1976 angka ini naik menjadi 8,4%, lalu naik lagi menjadi 9,1% pada tahun 1980. Dalam Supas 1986 tercatat serapan tenaga kerja industri 9,3%. Sektor-sektor nonpertanian lainnya, secara umum juga mengalami peningkatan.

Dari angka-angka perubahan itu terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih amat besar, yakni lebih dari separoh angkatan kerja. Dibanding dengan kontribusinya terhadap GDP, nampak adanya ketidakseimbangan antara besarnya *input* tenaga kerja dengan *output* yang

dihasilkan. Sebaliknya, pada sektor industri terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja yang amat lambat. Selama tiga Pelita pembangunan berlangsung, kontribusinya belum mencapai 10%. Dibanding dengan kontribusinya terhadap GDP, juga terjadi ketidakseimbangan, dalam arti produksi tinggi dicapai dengan *input* tenaga kerja yang kecil.

Hal yang menarik dari pergeseran angka kedua sektor menuju struktur ekonomi berimbang itu adalah dalam hal ketenagakerjaan. Dari segi kontribusi terhadap produk nasional, sektor industri memang telah melampaui pertanian. Namun, dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tetap dijejali tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam hal ini, memang masih terjadi surplus tenaga kerja pertanian sebagai bagian dari proses produksi. Tetapi harus dipahami pula, kelebihan tenaga kerja juga merupakan "beban" bagi sektor pertanian. Artinya, produksi dan pendapatan sektor pertanian harus dibagi oleh jumlah orang yang lebih banyak.

Pergeseran Ketenagakerjaan dan Masalahnya

Mengapa Tenaga Kerja Pertanian Bergeser

Ada dua jenis faktor yang menyebabkan bergesernya tenaga kerja dari pertanian ke nonpertanian. Faktor pertama adalah yang bersifat internal dan mendorong dari dalam (*push factors*), sedangkan yang kedua adalah yang bersifat eksternal dan menarik dari luar (*pull factors*). Termasuk di faktor yang pertama adalah rasio petani dan lahan, kondisi teknis sektor pertanian, nilai tukar produk pertanian, tingkat pendapatan petani dan unsur-unsur revolusi hijau. Pada faktor yang kedua dapat di-

identifikasi seperti tingkat upah sektor nonpertanian dan daya tarik perkotaan. Faktor-faktor inilah yang berpengaruh baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan.

Rasio Petani dan Lahan

Makin rendahnya rasio petani dan lahan (*land man ratio*) ditambah indeks gini penguasaan lahan yang timpang merupakan indikasi makin besarnya jumlah petani marginal di pedesaan, yakni mereka yang berlahan sempit atau tidak berlahan sama sekali. Status mereka mungkin penyakap, penyewa atau buruh tani. Kelompok ini adalah yang secara sosial ekonomi menempati posisi terendah dalam stratifikasi masyarakat petani.

Selain karena pertambahan penduduk, yang berarti juga pertambahan jumlah "calon" petani yang butuh lahan, hal tersebut juga disebabkan oleh terjadinya penciutan lahan-lahan tertentu dan makin sempitnya peluang ekstensifikasi. Penciutan lahan disebabkan oleh konversi lahan-lahan pertanian ke pemukiman, lokasi industri, perluasan kota, perkembangan sarana transportasi dan meluasnya lahan kritis. Sedangkan kemungkinan ekstensifikasi dibatasi oleh makin kurangnya areal hutan yang dapat dibuka.

Dalam keadaan tak bertanah maka petani terbelenggu pada situasi subsisten: suatu level ekonomi rumah tangga yang hanya memungkinkan untuk sekedar bertahan di ambang *survive*. Terjadinya gangguan ekologis usaha tani atau dilema internal yang berhubungan dengan strategi konsumsi, sudah cukup menjadikan rumah tangga mereka berada di titik rawan. Jalan keluar terbaik adalah mencari peluang kerja di luar pertanian, guna menaikkan pendapatan dan taraf hidup. Inilah faktor internal utama yang mendorong pergeseran

petani ke sektor nonpertanian.

Tingkat Pendapatan Petani

Petani padi dan palawija mempunyai pendapatan yang rendah, apalagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau berlahan sempit. Menurut hasil penelitian Prof. Sajogyo,¹ dari 18.429.915 rumah tangga petani di Indonesia, 61,60% tergolong "miskin" dengan kriteria pendapatan sama dengan atau di bawah batas biaya hidup rumah tangga pertanian yakni Rp. 50.000 per bulan per keluarga. Dari 18,42 juta keluarga petani yang menguasai 19,50 juta hektar tanah usaha tani yang ada, sebanyak 41,20% merupakan petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,50 hektar dan menguasai hanya 9,56% total luas tanah pertanian.

Nilai Tukar Produk Pertanian

Nilai tukar petani (NTP) ditetapkan FAO sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP ini dihitung sebagai rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkannya, sehingga dapat dijadikan petunjuk kemampuan tukar petani (*trade off*) dari produksi yang dihasilkan dengan kebutuhan barang dan jasa bagi konsumsi dan pengembangan usaha taninya.

Menurut laporan BPS,² nilai tukar yang dicapai petani selama ini masih rendah. Pemantauan di beberapa daerah sentra produksi (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta) menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang dari tahun ke tahun antara harga dasar gabah (HDG)

dengan NTP. Kenaikan HDG yang diupayakan pemerintah tiap tahun, rupanya tidak selalu dinikmati oleh petani.

Rendahnya NTP tidak hanya memberatkan buruh tani dan petani berlahan sempit, tetapi juga petani berlahan luas dengan *input* produksi tinggi, terutama yang mengusahakan padi. Pada komoditi nonpadi, seperti buah-buahan dan beberapa jenis tanaman keras misalnya coklat dan kopi, angka NTP-nya cukup tinggi, tetapi persinya rendah dalam populasi petani. Sejalan dengan kebijaksanaan pangan pemerintah maka kebanyakan petani mengusahakan padi baik di persawahan maupun lahan-lahan tadah hujan.

Unsur Revolusi Hijau

Sasaran utama revolusi hijau adalah meningkatkan produksi (terutama padi) secara cepat. Ini tercapai dengan digunakannya benih varietas unggul, *input* produksi modern (pupuk dan pestisida) dan perbaikan cocok tanam. Akan tetapi, persoalan ketenagakerjaan tidak menjadi perhatian revolusi hijau. Ternyata kemudian masalah ketenagakerjaan muncul sebagai *by product* revolusi hijau. Seyogianya dengan meningkatnya produksi pertanian, serapan tenaga kerja juga meningkat, agar dapat menangkali konsekuensi logis kondisi negara berkembang yang *over populated*.

Menurut Dibyso Prabowo (1988), sekurang-kurangnya ada empat hal dari revolusi hijau yang menyebabkan berkurangnya kadar "padat kerja" sektor pertanian: (1) makin melembaganya sistem tebasan, sehingga sistem derep menjadi tergeser; (2) digunakannya budaya sabit dalam panen padi menggeser budaya ani-ani yang padat kerja tenaga wanita; (3) digunakannya alat perontok padi yang langsung dapat dipakai di sawah; (4) varietas padi unggul yang

¹Kompas, 19 Maret 1987

²Kompas, 19 Mei 1989

berumur pendek menuntut penyiapan lahan yang segera untuk tanaman padi berikutnya. Penyiapan lahan yang serentak ini menyebabkan terjadinya "kekurangan" tenaga kerja, sehingga "mengundang" masuknya traktor. Seharusnya, dengan intensitas tanam yang lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja per hektarnya juga tinggi.

Kondisi Teknis Sektor Pertanian

Kondisi kerja sektor pertanian yang berkisar pada lumpur dan tanah persawahan, terik matahari dan ternak gembalaan sudah tidak menarik bagi generasi muda pedesaan, terutama yang berpendidikan relatif maju. Mereka memilih bekerja di sektor lain daripada berkecimpung sebagai petani yang dipandang berstatus "rendah". Ini terutama berlaku pada pemuda pedesaan dengan tingkat pendidikan relatif menengah.

Akibat peningkatan upah tenaga kerja, dinamika perekonomian sektor nonpertanian (terutama di perkotaan) berkembang lebih cepat dibanding sektor pertanian di pedesaan. Hal ini menyebabkan tenaga kerja pertanian di pedesaan tertarik untuk menikmati upah lebih tinggi tersebut. Biasanya mereka kemudian tertampung di sektor informal perkotaan.

Selain upah yang tinggi, gemerlap gaya hidup perkotaan yang "ramai" merupakan daya tarik tersendiri bagi pemuda pedesaan. Meskipun hanya menjadi buruh atau berjuang di sektor informal perkotaan, mereka lebih menyukainya karena di dalamnya terkandung kesempatan menikmati gaya hidup modern. Secara kultural, pedesaan masih identik dengan tradisionalisme dan perkotaan identik dengan modernisme.

Sektor Tujuan Pergeseran Tenaga Kerja

Menurut Hananto Sigit (1989) pekerja yang meninggalkan sektor pertanian adalah pekerja-pekerja marginal, yaitu yang tidak mempunyai ikatan kuat dengan pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaannya umumnya tidak tetap, sehingga bisa bergerak sangat *mobile*. Dengan kesempatan dan penghasilan yang sedikit lebih baik saja, mereka sudah akan beralih pekerjaan.

Data sensus yang ada menunjukkan pada tahun 1971 terdapat 23,3% buruh tani. Kemudian menurun menjadi 16,4% tahun 1980, 15,5% tahun 1985 dan 10,3% tahun 1987. Buruh tani mudah sekali bergerak ke sektor lain, karena mereka tidak mempunyai lahan dan rasa keterikatannya pada majikan hampir tidak ada. Penghasilannya rendah dan pekerjaannya tidak bisa diharapkan secara tetap.

Namun demikian, persentase buruh tani di sektor pertanian masih amat besar. Pada masa mendatang masih akan diperlukan banyak kesempatan kerja di sektor nonpertanian, mengingat selama ini sektor nonpertanian belum dapat menarik banyak petani berlahan di samping buruh tani itu sendiri. Bila semua buruh tani dan sebagian petani berlahan dapat terserap sektor nonpertanian, maka konsolidasi lahan dapat terjadi sehingga sektor pertanian mampu berproses lebih produktif.

Sektor tujuan pergeseran tenaga kerja pertanian umumnya adalah nonpertanian dengan aktivitas informal yang besar. Sektor perdagangan yang pada tahun 1985 menyerap hampir 34% tenaga kerja pertanian, diperkirakan bahwa lebih 80% pekerjanya ada di sektor informal. Begitu pula sektor industri, terutama industri kecil dan rumah tangga yang memiliki aktivitas

informal sangat tinggi, menyerap lebih 20% dari seluruh tenaga kerja nonpertanian. Sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah angkutan dan bangunan.

Sektor Informal dan Pengangguran di Pedesaan

Kenyataan angka-angka di atas menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pergeseran struktural tenaga kerja, kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan belum membaik. Ini terutama adalah karena buruh tani yang terserap ke sektor nonpertanian umumnya bekerja sendiri atau menjadi pekerja keluarga tanpa dibayar di sektor informal. Dengan demikian, sebenarnya pekerja setengah menganggur (*disguised unemployment*) masih tinggi, dan produktivitas kerja umumnya masih rendah. Pekerja pertanian hanya bergeser dari sektor informal pertanian ke sektor informal nonpertanian, sehingga ciri-ciri pekerja informal masih dominan.

Data perkiraan pekerja sektor informal nonpertanian (Hananto Sigit, 1989) menunjukkan kenaikan dari 11,7 juta (1980) menjadi 13,8 juta (1985), meskipun persentasenya menurun sedikit dari 22,9% menjadi 22,2%. Dalam pada itu, pekerja informal sektor pertanian tetap masih besar yaitu 28,6 juta (55,59%) pada tahun 1980 dan 34,1 juta (54,64%) pada tahun 1985. Meskipun telah terjadi pergeseran dari pertanian ke nonpertanian, pergeseran dari sektor informal ke sektor formal belum berlangsung dan keduanya justru meningkat. Artinya, baik sektor informal pertanian maupun sektor informal nonpertanian, justru mengalami perkembangan pesat. Persentase pekerja sektor formal memang meningkat dari 21,3% (1980) menjadi 23,3% (1985), tapi itu belum cukup untuk menggeser kedudukan sektor informal.

Ciri sektor informal pertanian maupun nonpertanian secara umum adalah sama saja, antara lain: kegiatan usahanya tidak terorganisasi secara baik; umumnya tidak mempunyai izin usaha; pola usaha tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerjanya; tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah; unit usaha mudah beralih antarsektor; berteknologi sederhana; skala operasi kecil karena perputaran modal usaha juga relatif kecil; tidak memerlukan pendidikan formal karena hanya berdasarkan pengalaman sambil bekerja; umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu pekerja yang tidak dibayar; modal tidak berasal dari lembaga keuangan resmi; sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dinikmati golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau sebagian kecil golongan masyarakat menengah (Hidayat, 1987).

Dengan ciri-ciri demikian, banyak pihak meragukan kemampuan sektor informal untuk menyerap tenaga kerja. Perkembangannya yang pesat dianggap sesuatu yang "salah kaprah" dalam pembangunan ekonomi, dan tingkat produksinya dianggap rendah (Hendra Esmara, 1986). Namun agaknya harus diakui bahwa selama ini sektor tersebut cukup berperan dalam menyerap tenaga kerja, sementara sektor formal terutama industri belum mampu menyerap dalam jumlah besar. Dalam kaitan inilah kebijaksanaan pemerintah untuk membina sektor informal dalam membenahi masalah ketenagakerjaan amat relevan, setidaknya untuk menangkal *out flow* tenaga kerja pertanian.

Berkembangnya Migrasi Desa-Kota

Sektor informal nonpertanian yang dituju oleh pekerja informal pertanian tidak

hanya berkembang di pedesaan tetapi terutama yang di perkotaan. Akibat terjadinya pergeseran pada sektor pertanian, arus migrasi desa-kota menjadi semakin meningkat. Kawasan perkotaan terpaksa harus menampung sejumlah tenaga kerja dengan keterampilan minimal, sehingga tidak sedikit membawa efek samping di perkotaan.

Tidak semua migran bekas pekerja pertanian ini dapat tertampung di sektor informal perkotaan, apalagi di sektor formalnya. Sebagian dari mereka menjadi penganggur, baik setengah maupun sepenuhnya; dan golongan ini cenderung menimbulkan eksese tindakan kekerasan. Kriminalitas dan pemukiman kumuh di perkotaan.

Dalam kaitan ini, meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, sebagai akibat dari migrasi desa-kota, tidak dapat diidentikkan sepenuhnya sebagai variabel modernitas sebagaimana dikatakan Lerner (1986). Perpindahan ke kota yang dilakukan pemuda pedesaan pada dasarnya bukan karena kemajuan sikap budaya atau kondisi ekonomi, melainkan karena keterdesakan akibat keterbatasan lapangan kerja di sektor pertanian-pedesaan. Dengan demikian, baik pengangguran maupun berkembangnya sektor informal dan meningkatnya migrasi desa-kota, dapat dipandang sebagai masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pergeseran ketenagakerjaan yang ada. Dengan asumsi bahwa pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke industri memang harus terjadi sesuai skenario pembangunan, maka munculnya masalah-masalah tersebut, merupakan konsekuensi logis dalam pembangunan negara-negara sedang berkembang.

Strategi Simbiosis Dalam Pembangunan

Strategi Interaksi Desa-Kota

Fenomena pergeseran tenaga kerja di pedesaan beserta masalah yang ditimbulkannya, tidak dapat ditelaah secara kritis bila dikaitkan hanya dengan variabel-variabel demografi saja. Gejala itu harus ditelaah dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan variabel-variabel nondemografi yang mempengaruhi. Strategi pembangunan yang selama ini dijalankan dengan paradigma dualistik pedesaan-perkotaan, seyogianya ditempatkan sebagai salah satu fokus untuk membenahi masalah tersebut.

Pembangunan yang berlangsung telah menempatkan kota dalam posisi perekonomian yang kuat. Sebaliknya, masyarakat pedesaan tetap menghadapi masalah pendapatan rendah yang dicerminkan oleh lemahnya daya beli. Dalam keadaan demikian, kondisi perekonomian kota merupakan penarik bagi masyarakat pedesaan untuk bermigrasi. Mekanisme inilah yang disebut Hidayat Nataatmaja (1989) sebagai mekanisme "tarik-tambang", yakni si kuat menarik si lemah. Sektor informal lalu berkembang pesat di kota, menampung migran dari pedesaan yang juga pekerja informal pertanian.

Mekanisme yang diperlukan adalah menciptakan kondisi yang mampu mempersempit kesenjangan perekonomian desa-kota. Perekonomian pedesaan perlu diperkuat agar pedesaan dapat berfungsi sebagai sentra produksi, sekaligus pasar yang baik. Dengan demikian, interaksi desa-kota bisa berlangsung dua arah secara seimbang, bukan hanya desa yang mendukung kota melainkan juga sebaliknya.

Strategi investasi dan pengaturan moneter seyogianya juga diarahkan ke pedesaan secara proporsional. Aktivitas produksi yang berlangsung di kota, dengan dukungan aktivitas produksi di desa dalam mekanisme ketergantungan, diharapkan mampu menampung bekas tenaga kerja pertanian. Bila faktor penarik dapat dibangun di desa dengan strategi investasi dan moneter yang relevan, masalah-masalah yang timbul karena pergeseran tenaga kerja di pedesaan sedikitnya dapat diatasi.

Simbiosis Pertanian dan Industri

Terbatasnya serapan tenaga kerja oleh industri padat modal yang berkembang, juga dapat dihubungkan dengan masalah-masalah yang timbul dalam pergeseran ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sektor primer industri seharusnya dapat menampung lepasan tenaga kerja pertanian. Tetapi hal ini sulit dilaksanakan karena terjadinya semacam *bottle neck* dalam peralihan pekerja pertanian ke industri sebagai akibat adanya prinsip *marginal productivity of labour*.

Interaksi simbiosis antara pertanian dan industri dalam hal ketenagakerjaan dapat dikatakan belum berlangsung dengan baik. Industri yang berkembang bersifat *high technology* sedangkan pekerja pertanian belum mampu terlibat di dalamnya.

Dalam kaitan ini, pengembangan industri kecil dalam pengolahan hasil pertanian perlu makin diintensifkan. Bidang inilah yang dapat menampung kelebihan tenaga pertanian di satu sisi, dan pada sisi lainnya pekerja pertanian mampu memasukinya. Bila segmen kerja ini berkembang, suatu interaksi simbiosis pertanian-industri dapat terwujud, sekaligus memberi sumbangan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan pergeseran tenaga kerja.

Mekanisme demikian juga berfungsi menciptakan kultur kerja peralihan dalam transformasi sosial ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial. Dengan berkembangnya kultur agroindustri di pedesaan berarti ada tahapan transisi yang menghubungkan dominasi aktivitas agromomis dengan aktivitas industrial. Oleh karenanya, peralihan *out flow* tenaga kerja pertanian ke industri lebih memungkinkan sesuai skenario transformasi jangka panjang pembangunan nasional.

Refleksi dan Implikasi

Masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja, yang berakibat pada pengangguran. Masalah ini juga berhubungan dengan dimensi-dimensi dinamis struktur internal sektor-sektor yang terlibat dan interaksi antara sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, pendekatan holistik atas dualisme "pertanian-industri" dan "pedesaan-perkotaan" dalam pembangunan merupakan salah satu kerangka analisis yang relevan untuk memahami kompleksitas persoalan yang ada.

Pergeseran ketenagakerjaan dari pertanian ke nonpertanian di kawasan pedesaan serta masalah yang timbul sebagai eksensinya merupakan konsekuensi logis dari kondisi negara sedang berkembang. Hal ini merupakan bagian dari transformasi sosial-ekonomi yang berlangsung sejalan dengan skenario pembangunan.

Ada dua faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pergeseran ketenagakerjaan di pedesaan. Faktor internal pertanian yang sifatnya mendorong (*push factors*) meliputi: rasio petani dan lahan, tingkat pendapatan petani, nilai tukar

produk pertanian, unsur revolusi hijau dan kondisi teknis sektor pertanian. Faktor eksternal nonpertanian yang sifatnya menarik dari luar (*pull factors*) meliputi tingkat upah sektor nonpertanian dan daya tarik perkotaan.

Meskipun pergeseran ketenagakerjaan telah berlangsung belum dapat dikatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang ada telah menjadi lebih baik. Golongan yang beralih umumnya adalah petani gurem dan buruh tani, sedang bidang baru yang mereka masuki kebanyakan sektor informal nonpertanian. Dengan demikian, tidak ada perubahan produktivitas dan pendapatan yang berarti dari pergeseran tersebut. Mereka hanya berpindah dari kemiskinan sektor informal pertanian ke kemiskinan sektor informal nonpertanian.

Suatu strategi interaksi desa-kota dengan penekanan pada perbaikan ekonomi pedesaan secara proporsional, perlu diintensifkan guna mengantisipasi persoalan yang merupakan eksekusi transformasi ketenagakerjaan. Strategi ini merupakan investasi yang dapat menjadikan desa berfungsi sebagai sentra produksi sekaligus sebagai pasar yang potensial.

Industrialisasi sebaiknya diarahkan pada pengembangan agroindustri yang dapat menyerap bekas tenaga kerja pertanian. Dengan demikian, luapan tenaga kerja pertanian dapat ditampung dalam sektor yang lebih primer dan produktif, sekaligus menciptakan "kultur kerja antara" dalam transformasi sosial ekonomi dari pertanian ke industri.

KEPUSTAKAAN

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

- Esmara, Hendra. *Perencanaan Pembangunan Pelita IV*. Gramedia: Jakarta, 1986.
- Hidayat. "Peranan dan Profil serta prospek Perdagangan Eceran (Formal dan Informal) dalam Pembangunan". *Prisma* Juli, 1987.
- Lerner, Daniel. *Memudarnya Masyarakat Tradisionil*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1958.
- Nataatmaja, Hidayat. *Asas Tunggal dalam Dunia Ilmu: Gelombang ke Tiga Syarat Mutlak Tinggal Landas pada Pelita VI*. Bogor: Lembaga Humanika, 1989.
- Prabowo, Dibyo. "Revolusi Hijau Bukan Untuk Menciptakan Kerja". *Prisma*, Januari, 1988.
- Pranaji, Tri. "Informasi dan Pembinaan Sektor Informal". *Analisis CSIS*. Nopember-Desember, 1989.
- Raharjo, Dawam. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. UI-Press: Jakarta, 1984.
- Rusli, Said. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. LP3ES: Jakarta, 1988.
- "Beberapa Pemikiran Tentang Studi Gerak Penduduk di Indonesia" dalam *Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjutan*. Bogor: Bagian Sosiologi dan Kependudukan Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB.
- Sigit, Hananto.. "Transformasi Ketenagakerjaan di Indonesia". *Prisma*, Mei, 1989
- Sumodinigrat, Gunawan dan Mudrajat Kuncoro. "Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri: Mencari Pola Simbiosis". *Prisma* Pebruari, 1990.